



Mengarahkan Dunia Untuk Meningkatkan Kerja Sama, Bukan Mengurangnya

Oleh Vitor Gaspar, Sean Hagan, dan Maurice Obstfeld



Dengan dunia yang menjadi lebih saling bergantung daripada sebelumnya, banyak negara dapat mewujudkan banyak hal ketika mereka bekerja sama (foto: Anton Sokolov / iStock oleh Getty Images)

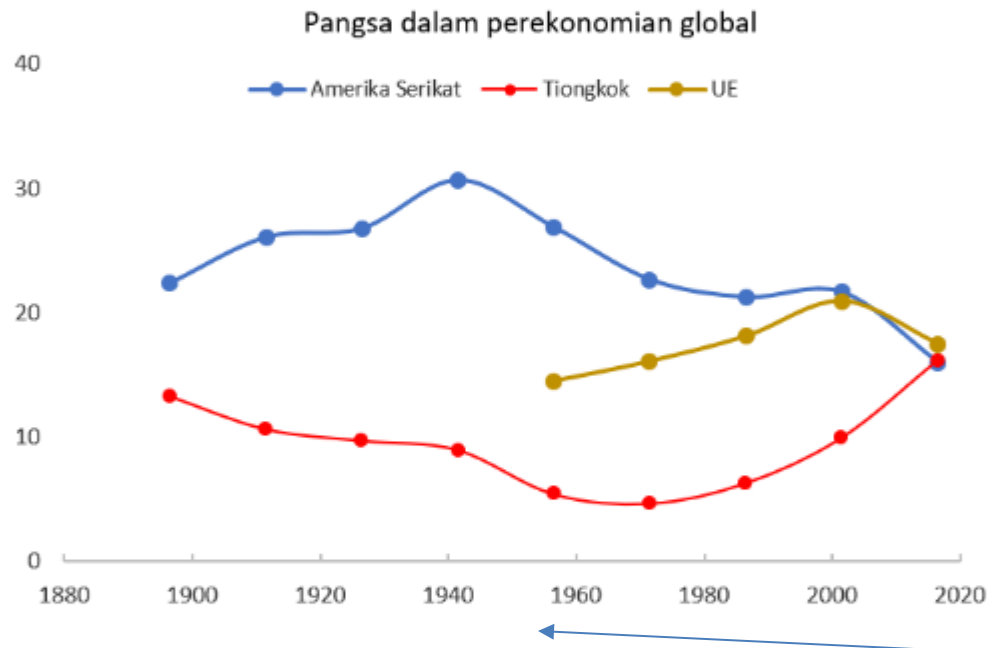
Negara-negara akan bekerja sama jika mereka menganggap kerja sama tersebut bermanfaat bagi mereka, baik secara ekonomi maupun politik. Kerja sama global pasca Perang Dunia II—melalui sistem aturan, prinsip bersama, dan kelembagaan—telah menghasilkan kemajuan ekonomi dan sosial yang besar, mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan tanpa asa. Dan ketika sepuluh tahun lalu negara-negara bergabung untuk mengoordinasikan kebijakan makroekonomi mereka, mereka memastikan bahwa Resesi Besar (*Great Recession*) tidak berkembang menjadi Depresi Besar (*Great Depression*) baru. KTT pertama para pemimpin Kelompok 20 (G-20) pada bulan November 2008—yang menyatukan negara-negara ekonomi maju dan ekonomi berkembang besar seperti Brasil, Tiongkok, dan India—melambangkan semangat kerja sama yang mendesak. Terbukti, negara-negara dapat mewujudkan banyak hal ketika mereka bekerja sama.

Namun, di masa ketika ekonomi dunia semakin rumit dan menghadapi banyak tantangan bersama, bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin enggan untuk mengambil tindakan kolektif. Kini, sistem kerja sama global sedang dilanda tekanan.

Konvergensi ekonomi global

Manfaat yang diperoleh negara maju dari mendukung barang publik global, seperti perdagangan internasional, semakin diagih dengan negara-negara lain.

(dalam persen)



Sumber: Maddison Project Database, World Economic Outlook (April 2018) IMF; dan perhitungan staff IMF.

Catatan: Setiap titik data pada bagan mewakili sebuah rata-rata 15-tahun PDB tahunan dunia tertimbang (pada Paritas Daya Beli (PPP), 2011 dollar AS) untuk setiap negara/kelompok pada perekonomian global.



INTERNATIONAL
MONETARY FUND

Memang ada berbagai alasan yang dapat dimengerti mengapa banyak orang mempertanyakan kelanjutan manfaat dari kerja sama internasional saat ini. Kesenjangan ekonomi dalam negeri di berbagai negara semakin melebar, terutama di negara ekonomi maju. Banyak rumah tangga tidak merasakan banyak manfaat dari pertumbuhan ekonomi, dan banyak kelompok masyarakat menderita akibat kehilangan pekerjaan dan bahkan sekaligus industri. Oleh karena itu, warga semakin bersedia mendengar ketika politisi mengklaim bahwa keterlibatan global menghambat penanganan masalah di dalam negeri.

Namun, menarik diri dari kerja sama internasional adalah sebuah kesalahan yang menciptakan kembali berbagai kondisi yang menimbulkan krisis di masa lalu. Akan tetapi, kebijakan kooperatif tidak akan terjadi, kecuali ada dukungan politik domestik. Karena itu, negara-negara akan rugi kecuali pemerintah dapat menunjukkan kepada warganya manfaat nyata dari kerja sama internasional.

Kerja sama internasional di bawah tekanan

Ada dua faktor utama yang telah melemahkan keyakinan orang akan manfaat kerja sama ekonomi.

Pertama, walau inovasi teknologi dan pertumbuhan perdagangan global telah secara drastis membantu mengurangi kesenjangan antara orang-orang yang tinggal di berbagai negara, hal ini rupanya juga adalah sebagian penyebab melebarnya kesenjangan tersebut di banyak negara ekonomi maju. Di mata publik, perdagangan tampaknya yang paling sering disalahkan, membuat orang waswas untuk memperluas perdagangan lebih jauh melalui peningkatan integrasi ekonomi.

Kedua, suksesnya kerja sama internasional sejak Perang Dunia II, seiring waktu, justru telah mengurangi pangsa kegiatan ekonomi dunia di negara-negara ekonomi maju di Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, dan meningkatkannya pangsa tersebut di negara-negara kekuatan ekonomi baru (*emerging markets*).

Bagan di atas menunjukkan evolusi yang sangat nyata ini sejak tahun 1950. Manfaat yang didapat Amerika Serikat dan negara-negara ekonomi maju lainnya dari mendukung barang publik global, seperti perdagangan internasional, semakin diagih dengan negara-negara lain.

Perkembangan ini mungkin dapat membantu menjelaskan mengapa keberhasilan globalisasi dan kerja sama internasional yang dipimpin AS dalam meningkatkan perdagangan dan pendapatan per kapita di seluruh dunia justru, secara paradoks, telah melemahkan dukungan publik terhadap kerja sama, di dalam negeri Amerika Serikat dan negara ekonomi maju lainnya. Kerja sama semakin sulit dipertahankan dalam dunia multipolar saat ini.

Kebutuhan abadi akan kerja sama global

Terlepas dari kesulitan-kesulitan tersebut, negara-negara membutuhkan lebih banyak—bukan lebih sedikit—multilateralisme. Mengapa? Karena dunia sudah semakin lebih saling bergantung daripada sebelumnya.

Pertama-tama, revolusi informasi telah meningkatkan koneksi dan kompleksitas di seluruh dunia. Gagasan mengalir ke mana-mana. Produksi telah menjadi semakin internasional melalui rantai pasokan global, karena negara-negara semakin bergantung pada bahan (*input*) dari luar untuk ekspor mereka sendiri.

Daftar masalah bersama ini memang menakutkan. Di antaranya: perubahan iklim, menurunnya keanekaragaman hayati, risiko pandemi dan kuman super (*superbugs*), kelangkaan air bersih, degradasi lautan, kejahatan dunia maya, terorisme, migrasi skala besar, dan penghindaran pajak.

Tantangan-tantangan ini tidak lagi peduli pada batas-batas negara; negara-negara perlu bekerja sama.

Dunia kita juga dipersatukan oleh berbagai bentuk perdagangan yang merusak secara sosial, seperti penyelundupan manusia, narkoba, dan senjata, serta aliran uang gelap lintas-batas yang anonim. Sekali lagi, pihak berwenang di berbagai negara kewalahan untuk mendapatkan solusi. Tindakan kolektif menjadi hal yang vital.

Membangun dukungan yang lebih besar

Walaupun begitu, pemerintah baru akan menolak godaan untuk mengambil kebijakan “kita terlebih dahulu” (“*us first*”) hanya jika kerja sama dapat menarik dukungan publik yang luas. Dan hal ini hanya akan terjadi jika kerja sama internasional dianggap dapat meredakan kekhawatiran yang sah dan dianut secara luas mengenai dampak dari globalisasi. Jika tidak, warga akan mudah menjadi mangsa para politisi yang membuai senandung “swasembada” (*self-sufficiency*).

Ini berarti semua pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan-kebijakan dapat membantu mereka yang terkena dampak dislokasi, baik dari perdagangan maupun kemajuan teknologi. Hal ini juga berarti mendorong kebijakan-kebijakan yang mengurangi kesenjangan, memperluas peluang ekonomi melalui investasi pada manusia, meningkatkan transparansi pemerintah (khususnya sistem perpajakan), dan mengurangi korupsi.

Dalam beberapa tahun terakhir, IMF semakin fokus pada isu-isu tersebut dalam semua aspek sarannya kepada negara-negara.

Membangun dukungan bagi kerja sama juga akan membutuhkan kerendahan hati. Lewat sudah masa-masa romantis pasca perang—ketika negara-negara bersedia

merelakan elemen-elemen kedaulatan mereka, termasuk kedaulatan nilai tukar. Cara kerja sama yang lebih penting akan bergantung pada hukum “lunak” (“*soft law*”), di mana negara-negara bersama-sama sepakat untuk menerapkan praktik terbaik, seperti *Basel Core Principles* (Prinsip-Prinsip Inti Basel) yang mengatur regulasi bank, alih-alih hukum “keras” atau kewajiban traktat yang mengikat secara hukum.

Kerja sama global selama ini telah memainkan peran penting dalam perluasan kesejahteraan dan kesempatan yang begitu mengesankan selama tujuh puluh tahun terakhir. Sekarang kerja sama global harus menunjukkan hasil untuk menjawab tantangan abad ke-21. Mengatasi berbagai tantangan ini membutuhkan cara kerja sama yang baru, komunikasi yang lebih baik, dan agenda kebijakan global yang dapat diterima luas oleh publik.

Singkatnya, dunia membutuhkan multilateralisme baru.



Vitor Gaspar, seorang warga negara Portugal, adalah Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF. Sebelum bergabung dengan IMF, ia memegang berbagai posisi kebijakan senior di *Banco de Portugal*, termasuk terakhir sebagai Penasihat Khusus. Ia menjabat sebagai *Minister of State and Finance* Portugal pada tahun 2011–2013. Ia pernah menjabat kepala Kantor Penasihat Kebijakan Eropa (*Bureau of European Policy Advisers*) di Komisi Eropa selama tahun 2007-2010, serta direktur jenderal penelitian di Bank Sentral Eropa (*European Central Bank*) dari tahun 1998 hingga 2004. Vitor Gaspar memiliki gelar PhD dan *post-doctoral agregado* di bidang Ekonomika dari *Universidade Nova de Lisboa*. Ia juga pernah belajar di *Universidade Católica Portuguesa*.



Sean Hagan adalah *General Counsel* dan Direktur Departemen Hukum IMF. Sebelumnya ia menjalankan praktik swasta di New York dan Tokyo. Ia bekerja sebagai penasihat bagi manajemen, Dewan Eksekutif, dan keanggotaan IMF dalam semua aspek hukum operasional IMF, termasuk pada fungsi-fungsi regulasi, pemberian advis, dan penyaluran pinjamannya. Ia telah banyak menghasilkan karya tulis baik tentang hukum IMF maupun berbagai masalah hukum tentang pencegahan dan penyelesaian krisis keuangan, dengan penekanan khusus pada kepailitan dan restrukturisasi utang.



Maurice Obstfeld adalah Penasihat Ekonomi dan Direktur Riset pada Dana Moneter Internasional, yang kini sedang cuti dari University of California, Berkeley. Di Berkeley, ia adalah Profesor Ekonomi Angkatan 1958 dan sebelumnya Ketua Departemen Ekonomika (1998-2001). Ia bergabung dengan Berkeley pada tahun 1991 sebagai profesor, setelah penugasan permanen di Columbia (1979-1986) dan University of Pennsylvania (1986-1989), dan sebagai dosen tamu di Harvard (1989-90). Ia menerima gelar Ph.D. dalam bidang ekonomika dari MIT pada tahun 1979 setelah kuliah di University of Pennsylvania (B.A., 1973) dan King's College, Cambridge University (M.A., 1975).

Dari bulan Juli 2014 hingga Agustus 2015, Dr. Obstfeld menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat Ekonomi Presiden Obama. Sebelumnya (2002-2014), ia pernah menjadi penasihat kehormatan untuk *Bank of Japan's Institute of Monetary and Economic Studies*. Ia adalah *Fellow* pada *Econometric Society* dan *American Academy of Arts and Sciences*. Di antara penghargaan Dr. Obstfeld adalah *Tjalling Koopmans Asset Award* dari *Tilburg University*, *John von Neumann Award* dari *Rajk Laszlo College of Advanced Studies* (Budapest), dan *Bernhard Harms Prize* dari *Kiel Institute*. Ia telah memberikan ceramah-ceramah terkemuka, termasuk ceramah tahunan *Richard T. Ely Lecture* di *American Economic Association*, *L.K. Jha Memorial Lecture* di *Reserve Bank of India*, dan *Frank Graham Memorial Lecture* di Princeton. Dr. Obstfeld pernah menjabat pada Komite Eksekutif serta sebagai Wakil Presiden *American Economic Association*. Ia sudah banyak memberikan konsultasi dan mengajar di IMF dan banyak bank sentral di seluruh dunia.

Ia juga merupakan salah satu penulis dari dua buku pelajaran terkemuka mengenai ekonomi internasional, *International Economics* (edisi 10, 2014, bersama Paul Krugman dan Marc Melitz) dan *Foundations of International Macroeconomics* (1996, bersama Kenneth Rogoff), serta lebih dari 100 artikel penelitian tentang nilai tukar, krisis keuangan internasional, pasar modal global, dan kebijakan moneter.